

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sekolah Indonesia Bangkok

a. Sejarah Sekolah Indonesia Bangkok

Sejarah Sekolah Indonesia Bangkok tidak lain yakni berawal dari cita-cita Bangsa Indonesia dalam upaya mencerdaskan masyarakatnya, yaitu Pemerintah Indonesia mendirikan layanan berbagai lembaga pendidikan dalam mengupayakan dan memberikan layanan pendidikan kepada warganya salah satunya yakni kepada rakyat Indonesia yang berdomisili dan bekerja di luar negeri. Dapat kita ketahui 15 Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang tersebar di 11 negara diantaranya, Malaysia, Singapura, Pilipina, Thailand, Myanmar, Jepang, Saudi Arabiyah, Syiriah, Mesir, Belanda dan Rusia. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesua yang berada di Negara tersebut dengan mengikuti aturan dan pendidikan layaknya di Indonesia dengan kurikulum yang telah di gabungkan antara Indonesia dengan Negara masing-masing.

Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) merupakan satu-satunya sekolah Indonesia yang berada di Thailand, sekolah ini berdiri pada tanggal 6 Oktober 1962 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Berdirinya

sekolah ini setelah berlangsungnya kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (KEMENLU) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), yang selanjutnya dibangunlah Sekolah Indonesia Bangkok pada tahun 1967. Sekolah ini berawal hanya SMP dan SMA saja yang diresmikan oleh: H.R. Dharsono Duta Besar RI untuk Thailand tanggal 14 Januari 1971. Namun pada saat ini Sekolah Indonesia Bangkok sudah terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutubagi warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil termasuk anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pemerintah memiliki kewajiban memberikan layanan, kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, warga negara yang karena kendala ekonomi, sosial, geografis, dan lainnya menyebabkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak pendidikannya, perlu mendapat pendidikan layanan khusus. Sehubungan dengan itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pada tahun 2018 merencanakan dan mengalokasikan berupa Bantuan Pendidikan SILN. Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018, dialokasikan dana bantuan pendidikan SILN untuk 17.159 siswa yang disalurkan langsung ke rekening sekolah.

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) merupakan sekolah yang ditujukan untuk anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri. Sistem pengajaran pada SILN mengikuti kurikulum yang berlaku di Indonesia dan di kombinasikan dengan kurikulum yang berlaku di negara masing-masing, sehingga diharapkan anak-anak Indonesia yang belum pernah ke Indonesia atau orang tuanya bekerja di luar negeri bisa mengikuti pendidikan. Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) merupakan bantuan yang diberikan kepada sekolah Indonesia di luar negeri dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan lulusan dari bagian pendidikan yang diselenggarakan.

Sekolah Indonesia Bangkok merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan perlu diupayakan sehingga mutu lulusannya setara dengan lulusan sekolah Indonesia di dalam negeri. Bahkan bila memungkinkan setingkat dengan sekolah internasional yang bermutu (wawancara pada tanggal 18 Agustus 2019)

b. Visi dan Misi Sekolah Indonesia Bangkok

Saat ini Sekolah Indonesia Bangkok Terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA, yang terletak dalam satu lingkungan dan saat ini siswa di SIB berjumlah 105 siswa. Adapun Visi, Misi, dan Tujuan sekolah ialah sebagai berikut : a. Visi

Sekolah Indonesia Bangkok memiliki visi yaitu, “terwujudnya warga sekolah yang berbudaya Indonesia, cerdas, dan kompetitif.” Indikator:

1. Terwujudnya insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, nasionalisme, serta berbudaya Indonesia.
2. Terwujudnya lulusan yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang unggul
3. Terwujudnya lulusan yang selalu siap untuk menghadapi persaingan global

Untuk mewujudkan visi yang telah di sebutkan di atas, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing;
2. Menanamkan nilai-nilai ke-Indonesiaan melalui pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
3. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya untuk dikembangkan secara optimal;
4. Melaksanakan pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan);
5. Membiasakan budaya kompetitif siswa dalam menghadapi persaingan global melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik

c. Tujuan Sekolah Indonesia Bangkok

Sejalan dengan Tujuan Pendidikan Dasar dalam Peraturan Pemerintah terdapat beberapa tujuan berdirinya Sekolah Indonesia Bangkok, diantaranya:

1. Mewujudkan insan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, nasionalisme, serta berbudaya Indonesia.
2. Mewujudkan lulusan yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik yang unggul.
3. Mewujudkan peserta didik yang tanggap terhadap perubahan zaman dan mampu menghadapi persaingan global.

d. Letak Geografis Sekolah Indonesia Bangkok

Sekolah Indonesia Bangkok terletak di wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok yaitu di jalan Petchburi 600-602, Bangkok 10400, Thailand. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok memiliki luas tanah 22.724 dan Sekolah Indonesia Bangkok berada didalamnya. Lihat pada lampiran gambar 1.1.

Adapun denah peta Sekolah Indonesia Bangkok (ruang pembelajaran) dengan lebar 25 meter dan panjang 25 meter yang terdiri dari ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan dan sarana prasarana seperti taman belajar, tempat bermain, kolam. Lihat pada lampiran gambar 1.2.

e. Struktur Organisasi Sekolah Indonesia Bangkok

Organisasi merupakan suatu wadah yang menciptakan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Dengan adanya organisasi akan menciptakan pembagian kerja yang sistematis dan rapi sehingga setiap pembagian tugas memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Sebuah lembaga sekolah tidak akan tercipta kejelasan alur

koordinasi antar sesama warga sekolah apabila tidak memiliki sebuah susunan organisasi yang jelas, oleh sebab itu Sekolah Indonesia Bangkok pun memiliki struktur organisasi yang bertujuan memudahkan pekerjaan sesama dan agar tidak timbul kesalah fahaman antar sesama individu, berikut struktur organisasi yang terdapat di Sekolah Indonesia Bangkok.

Dapat kita ketahui bahwa struktur organisasi yang di Sekolah Indonesia Bangkok, yang diketuai oleh KEPRI yakni bapak Duta Besar Indonesia Bangkok Bapak Ahmad Rusdi, dilanjutkan oleh ATDIKBUD dan BP SIB DCM KBRI BKK, kemudian dilanjutkan oleh kepala sekolah Bapak Olih Sodikul Hikmah dan komite sekolah ATDIKBUD, lalu dibawah oleh tata busana yang terperinci menjadi 3 bagian yakni kesiswaan, umum dan keuangan, dilanjutkan bagian wakil ketua sekolah Bapa Daya Wardaya, Wakasek kurikulum Yudi Saroso, Pemb. Pir. UR. Humas Ibu Agustina Rahmawati, Pemb. Pir. UR SARPRAS ibu Endang dibawah oleh seluruh guru dan wali kelas serta diakhiri oleh seluruh siswa Sekolah Indonesia Bangkok.

f. Keadaan Siswa dan Guru

1) siswa

Siswa merupakan unsur terpenting dalam suatu pendidikan. Dan dengan adanya siswa itulah suatu lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan baik yaitu mengembangkan potensi siswa yang menjadi peserta didik lembaga tersebut.

Sekolah Indonesia Bangkok memiliki empat jenjang pendidikan yaitu Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Mengah Pertama dan Pendidikan Menegah Atas. Sehingga dengan adanya empat jenjang tersebut di satu lembaga maka lembaga tersebut memiliki banyak siswa. Jumlah siswa Sekolah Indonesia Bangkok pada tahun 2019 sebagai berikut

Siswa TK terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi, jumlah keseluruhan terdapat 15 siswa. Siswa SD terdapat 8 siswa kelas I, 5 siswa kelas II, 8 siswa kelas III, 6 siswa kelas IV, 9 siswa kelas V, 8 siswa kelas VI. Sehingga jumlah siswa SD terdapat 44 siswa.

Siswa SMP terdapat 5 siswa kelas VII, 6 siswa kelas VIII, dan 5 siswa kelas IX. Sehingga terdapat 16 siswa SMP. Sedangkan siswa SMA terdapat 4 siswa kelas X IPA, 2 siswa kelas X IPS, 3 siswa kelas XI IPA, 4 siswa kelas XII IPA, dan 4 siswa kelas XII IPS. Sehingga total siswa SMA terdapat 21 siswa. Dan total keseluruhan siswa SIB pada tahun 2019 terdapat 96 siswa. Lihat pada lampiran tabel 2.1.

2) Guru

Guru memiliki peran yang signifikan dalam melancarkan proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru di Sekolah Indonesia Bangkok bertanggung jawab dalam proses pembelajaran.

Terdapat 16 guru di Sekolah Indonesia Bangkok yang di kepalai oleh Kepala Sekolah yakni Bapak Olih Sodikul Hikmah dengan NIP 19670613 merupakan guru GT PNS dengan NPUTK 9945745646200002, dilanjutkan oleh wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Bapak Yudi Saroso dengan NIP 196608131997031002 merupakan guru GT PNS dengan NPUTK 9145744646200023, dilanjutkan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan yakni Bapak Daya Wardaya dengan NIP 197702192005011004 merupakan guru GT PNS dengan NPUTK 3551755657200002, dilanjutkan oleh Iwan Gunawan dengan NIP 197111292010011006 merupakan guru seni budaya dan Pkn yang termasuk guru GT PNS dengan NPUTK 5461749650200003, dilanjutkan guru Biologi dan bahasa Indonesia yakni Inrayati Atdjo dengan NIP 197601112006042032 merupakan guru GT PNS dengan NPUTK 4443754655200022, dilanjutkan guru kimia Ibu Bekti Nusantara merupakan guru GT Non PNS dengan NPUTK 8636737638200022, dilanjutkan guru geografi, ekonomi dan tata usaha Ibu Intan Nurhandayani merupakan guru GT Non PNS, dengan NPUTK 3947743644300082, dilanjutkan guru Pemb. Pimp. UR. Sarpras ibu Endang Sri Sumartini merupakan guru GT Non PNS dengan NPUTK 8536742644300053, dilanjutkan guru penjaskes dan sejarah Bapak Didid Janu Dwiana merupakan guru GT Non PNS dengan NPUTK 4440745646200012, dilanjutkan guru kelas SD ibu Agustina Rahmawati merupakan guru GT Non PNS dengan NPUTK 7134746648300093,

dilanjutkan guru TIK dan Pkn Bapak Soleh merupakan guru GT Non PNS dengan NPUTK 4559754658200003, dilanjutkan oleh guru PAI Ayif Hilman Fahri merupakan guru GT Non PNS, dilanjutkan guru TK dan Seni tari ibu Sri Ernawati merupakan guru GT Non PNS, dilanjutkan guru Bahasa Indonesia ibu Tanti Yosefha merupakan guru GT Non PNS, dilanjutkan guru TK ibu Ela Hayati merupakan guru GT Non PNS, dan terakhir guru Bahasa Thai Sari Suharyo merupakan guru GT Non PNS. Lihat pada lampiran tabel 2.2.

Data guru diatas dapat dipahami bahwa, semua guru berjumlah 16 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Para guru di atas merupakan lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan. Hal ini akan memberikan pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Secara umum guru merupakan lulusan S1, namun telah melewati tes guru SILN, sehingga dapat diketahui memiliki kemampuan kompetensi diatas rata-rata.

g. Sarana dan prasarana

Dalam rangka menunjang seluruh program sekolah, diperlukan pendukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung jalannya proses pembelajaran. Dengan adanya sarana dan prasarana akan membantu guru dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang kreatif dan hal inilah sangat diperlukan dalam mengembangkan potensi siswa (Magfiroh, 2017, p. 3).

Sekolah Indonesia Bangkok memiliki beberapa fasilitas yang bermanfaat, memumpuni dan membantu dalam proses pembelajaran,

contohnya adalah tersedianya gedung, perlengkapan belajar mengajar, asrama, perlengkapan administrasi, perlengkapan ruangan, hal inilah yang membantu guru untuk menggunakan metode yang kreatif. Adapun daftar sarana dan prasarana Sekolah Indonesia Bangkok sebagai berikut:

- 1) Ruang pembelajaran terdiri ruang kelas, berjumlah 15 dengan luas 56 m dengan keterangan kecil dan kurang memadai dikarenakan terlalu sempit dan dinding disekat. Selanjutnya ruang guru terdapat 1 ruang kepala sekolah dengan luas 60 m dan 1 ruang guru dengan luas 102 m, dilanjutkan ruang pelayanan dengan luas 56 m. lihat pada lampiran tabel 2.3.
- 2) Ruang perpustakaan. Lihat pada lampiran tabel 2.4.
- 3) Ruang laboratorium kimia. Lihat pada lampiran tabel 2.5.
- 4) Ruang laboratorium fisika. Lihat pada lampiran tabel 2.6.
- 5) Ruang laboratorium biologi. Lihat pada lampiran tabel 2.7.
- 6) Ruang laboratorium komputer. Lihat pada lampiran tabel 2.8.
- 7) Ruang laboratorium bahasa. Lihat pada lampiran tabel 2.9.
- 8) Lapangan olahraga
- 9) Tempat ibadah atau masjid
- 10) Gedung serba guna
- 11) Lapangan upacara

h. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar pembelajaran kelas. Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan bakat, potensi yang

dimiliki siswa (Tarenaksa, 2017, p. 143). Sekolah Indonesia Bangkok memiliki ekstrakurikuler yang sangat memumpuni, dan juga mengutamakan ekstrakurikuler selain hanya belajar mengajar, hal tersebut dikarenakan SIB sering diminta untuk menampilkan seni budaya, pentas seni, ataupun sejenisnya dalam acara besar ASEAN, DUNIA dan juga perlombaan ataupun mewakili Indonesia dalam unjuk gelar seni antar Negara. Diantara ekstrakurikuler yang diutamakan yakni seni tari-tarian, seni music angklung, seni melukis dan mewarnai, seni bernyanyi, dan main music, seni pencak silat dan beladiri, olahraga, teater, pramuka, telling stori dan lain sebagainya.

Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler maka siswa tersebut dapat menguasai segalanya, seperti ilmu keorganisasian yaitu ilmu penataan hidup dan krampilan hidup yang nantinya bisa buat bekal ketika terjun langsung di hadapan masyarakat banyak, dan juga siap mental dan keterampilan dapabila diminta untuk tampil.

2. Kebijakan di Sekolah Indonesia Bangkok

Sekolah Indonesia Bnagkok merupakan salah satu lembaga pendidikan Indonesia yang berada di Luar Neger (Bangkok) yang memiliki kebijakan-kebijakan didalamnya. Terdapatnya kebijakan-kebijakan yang ada sebagai sebuah system dalam lembaga tersebut, guna meningkatkan kualitas lembaga tersebut, diantara kebijakan yang ada sebagai berikut :

a. Kebijakan Standar isi Sekolah Indonesia Bangkok

- 1) Sekolah Indonesia Bangkok memberlakukan dua kurikulum yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Kurikulum 2006 diberlakukan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 Jenjang SD; kelas 8 dan 9 jenjang SMP; serta kelas 11 dan 12 jenjang SMA. Pada tahun pelajaran ini secara bertahap Kurikulum 2013 mulai diberlakukan di kelas 1 dan 4 untuk jenjang SD, kelas 7 untuk jenjang SMP dan kelas 10 untuk jenjang SMA.
- 2) Pada tahun, 2018/2019, kurikulum 2006 diberlakukan di kelas 3 dan 6 jenjang SD; kelas 9 jenjang SMP serta kelas 12 jenjang SMA. Sedangkan kelas yang memberlakukan Kurikulum 2013 jumlahnya bertambah, yaitu kelas 1, 2, 4 dan 5 untuk jenjang SD; kelas 7 dan 8 untuk jenjang SMP; serta kelas 10 dan 11 untuk jenjang SMA.
- 3) Pada tahun pelajaran 2019/2020 yang sedang berjalan, kurikulum 2006 tidak lagi diberlakukan di SIB. SIB secara penuh memberlakukan Kurikulum 2013 mulai jenjang SD sampai dengan SMA, kelas 1 sampai dengan kelas 12.

Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 secara menyeluruh di semua jenjang dan tingkatan, Sekolah Indonesia Bangkok harus memiliki KTSP Kurikulum 2013. Penyusunan KTSP Kurikulum 2013 Sekolah Indonesia Bangkok direncanakan dilakukan melalui kegiatan workshop untuk setiap jenjang (SD, SMP dan SMA). Kegiatan akan dilaksanakan pada awal tahun pelajaran 2019/2020.

b. Kebijakan Standar proses

- 1) Guru harus menciptakan proses pembelajaran yang baik, guru harus mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sesuai dengan perkembangan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaranpun dilakukan.
- 2) Guru harus mengajar dengan berbasis HOTS (Higher Order Thinking Skills) dan pembelajaran berbasis STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) yang merupakan bagian dari pemberlakuan Kurikulum 2013 mulai diterapkan. Demikian pula dengan pemanfaatan dan penerapan “Mind Map Based Learning” oleh para guru di masing-masing kelas.
- 3) Guru harus mampu mempersiapkan pemanfaatan “Kelas Maya” di “Rumah Belajar” dengan koordinasi dan panduan dari Pustekom Kemendikbud RI.

c. Kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan

- 1) Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus menjadi guru yang mampu mengajar berbagai jenjang (multi grades).
- 2) Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus mampu mengajar berbagai mata pelajaran (multi subjects).
- 3) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan terus menerus. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan workshop. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama perguruan tinggi di tanah air,

SEAMEO, pakar, instansi swasta, Kemendikbud dan guru SIB yang memiliki kapasitas pada bidang pelatihan.

- 4) Guru Sekolah Indonesia Bangkok harus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas guru seperti (1) pelatihan implementasi kurikulum 2013; (2) penguatan pendidikan karakter; (3) workshop pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS; (4) workshop implementasi kurikulum 2013 berbasis STEM; (5) mind map based learning; (6) Smart School; (7) Sea creative camp; (8) pelatihan menulis satu guru satu buku (sagusabu); (9) workshop pembuatan soal berbasis komputer; (10) pertemuan dan perkumpulan dengan sekolah Luar Negeri; (11) Perkumpulan dan pelatihan dengan staff KBRI; (12) seluruh seminar yang berbasis international;
- 5) Selain kegiatan di atas, guru dan tenaga kependidikan harus mendapat dukungan untuk melakukan peningkatan kapasitas diri secara mandiri melalui kegiatan pelatihan secara daring dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan seminar atau konferensi yang diselenggarakan di Bangkok atau Thailand dan ASEAN.

B. Analisis kebijakan di SIB

Kebijakan pengembangan kompetensi professional guru merupakan sebuah kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan dan beberapa alasan, faktor-faktor dan penilaian terhadap situasional (Mahfud, 2017, p. 133), oleh sebab itu setiap sekolah atau lembaga memiliki hak dan juga wewenang untuk mengambil

dan membuat keputusan guna mengembangkan lembaga pendidikan yang ada, dengan kunci kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, selanjutnya kebijakan yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok berkenaan dengan guru dan pendidik sebenarnya sama dengan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia hanya saja lembaga ini menambahi yaitu dengan mengikuti faktor keberadaan di Luar Negeri.

Sebuah kebijakan dapat dikatakan baik apabila kebijakan yang ada dibuat berdasarkan aspirasi dan juga berpihak kepada realitas masyarakat yang ada, dengan mendasarkan beberapa kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Hal tersebut juga kebijakan yang ada di Sekolah Indonesia Bnagkok pembuatan dan perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan banyak hal, karena akan berdampak kepada public.

Kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok merupakan bagian kebijakan pendidikan yang mana tujuannya adalah mengembangkan dan menciptakan kualitas guru professional untuk mencetak kualitas peserta didik menjadi lebih baik. Kebijakan inipun dibuat dan dilaksanakan untuk memaksimal mutu dan kualitas pendidikan yang ada.

Beberapa hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok, penulis berhasil menemukan data-data terkait kebijakan tersebut. Data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Latar Belakang Perumusan Kebijakan

Kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok merupakan wujud nyata dari sebuah jawaban tantangan pendidikan khususnya yang dialami oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri, yakni disebabkan letak geografis sekolah berada di Luar Negeri dan juga diharapkan agar siswa-siswi di lembaga tersebut siap apabila harus terjun pada dunia dalam mewakili Indonesia.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan (KEMENDIKBUD) Kedutaan Besar Republik Indonesia Bapak Mustari merumuskan kebijakan yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok guna mengoptimalkan keprofesionalan sebuah otentitas guru dalam mengajar sehingga mendapatkan hasil dan mutu kualitas pendidikan yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KEMENDIKBUD KBRI Bangkok, penulis menyimpulkan terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru, beberapa landasan tersebut diantaranya:

a. Landasan historis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok penulis dapat mengetahui bahwasannya segala hal yang ada tidak akan dapat dipisahkan dari sebuah sejarah yang ada. Maksudnya yakni sejarah diadakan dan didirikan sebuah lembaga Sekolah Indonesia Luar Negeri yakni melayani masyarakat yang ada di Luar Indonesia dengan mengikuti dan melihat tujuan dan cita-cita Bangsa

juga Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu sebuah lembaga SILN adalah sebuah upaya dan bentuk pendirian lembaga untuk mengatasi masalah yang ada (wawancara pada tanggal 21 agustus 2019).

Jawaban yang sama juga penulis dapatkan dari wawancara dengan kepala sekolah Sekolah Indonesia Bangkok yaitu Bapak Olih Sodikul Hikmah, terkait penambahan kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok “Alasan bertambahnya kebijakan yang ada tidak lain guna bertambahnya sebuah tanggung jawab seorang guru dalam menciptakan mutu kualitas yang unggul” (wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019)

b. Landasan geografis

Pada landasan kedua bahwa alasan adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru dikarenakan:

Kita harus membuka mata dan juga hati serta fikiran dengan setelah disahkannya menjadi pendidik SILN, yang mana kita bukan berada di Indonesia akan tetapi di Luar Negeri, sudah pasti kita sering berkumpul, acara, lomba dan lain sebagainya dengan Luar Negeri yang lainnya. Selain itu ketika kita sudah berada di Luar Negeri kita juga harus menggabungkan segala tujuan, dan aturan antara Indonesia juga yang berada disini, oleh sebab itu tanpa adanya pengembangan kompetensi yang merujuk pada letak geografis yang ada kita tidak akan bisa mengikuti dan mengembangkan sebagaimana yang harus dilakukan (wawancara 20 Agustus 2019).

Kepala sekolah Taman Kanak-kanak Sekolah Indonesia Bangkok yang juga merupakan istri dari atasan staff Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ibu Sri Ernawati juga memberikan pendapat yang serupa “adanya sebuah kebijakan ini dikarenakan sebagai bentuk akan

tanggung jawab yang tinggi dan serius akan tugas sebagai delegasi guru SILN demi menciptakan mutu dan mewujudkan tujuan Bangsa” (wawancara 23 Agustus 2019).

c. Landasan yuridis

Kebijakan pengembangan kompetensi profesional guru ini memiliki landasan hukum dimana dapat kita ketahui pada kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang menjadi landasan kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Bahwa system pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

2. Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi kebijakan adalah tahapan untuk melihat apakah kebijakan yang ada telah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kebijakan itu sendiri atau telah berubah arah. Dalam sebuah kebijakan terdapat hal penting yakni tujuan kebijakan harus jelas dan juga sasaran yang akan melakukan tugas dan juga bagaimana kebijakan tersebut harus dilakukan (Ramdhani, 2017, p. 4).

Pada pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi profesional guru di Sekolah Indonesia Bangkok implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Pihak yang harus melakukan

kebijakan itu pun juga jelas yakni guru atau pendidik yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok. Cara dalam pelaksanaan kebijakan tersebut juga jelas yakni seluruh guru yang telah di sahkan menjadi guru SILN melalui serangkaian tes baik Nasional maupun Internasional.

Proses pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi professional guru sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kepala Sekolah sebagai berikut (hasil wawancara 21 Agustus 2019):

- a. Guru yang telah disahkan dan datang di Sekolah Indonesia Bangkok menjalankan aturan-aturan baik kurikulum, pelaksanaan mengajar dan lain sebagainya menurut yang ia ketahui dan telah ia jalankan di sekolah Indonesia sebelumnya.
- b. Setelah melaksanakan sebagaimana mestinya guru di arahkan akan kebijakan tambahan yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok.
- c. Dilatihkan dari berbagai latihan pengembangan kompetensi professional yang ada dengan guru-guru terdahulu.
- d. Dan tahap akhir guru harus benar-benar melakukan tanggung jawab sebuah guru dengan kondisi geografis yang ada, mengikuti waktu yang ditentukan, multi grades, multi subjek, dan serba disiplin juga cekatan dalam menindak lanjuti tugas.

Hasil wawancara diatas juga di beri komentar yang sama oleh bagian kurikulum yaitu Ibu Inrayati Atdjo dan Bapak Daya Wardaya, sehingga menjadi jelas berkenaan dengan aturan dan proses pelaksanaan kebijakan yang ada bagi pendidik.

3. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan

Penilaian dan juga evaluasi sebuah kebijakan adalah sebuah aktivitas untuk melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dampak apa saja yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Mania, 2017, p. 222). Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber menemukan beberapa data wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan penilaian dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Dampak dari adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru

Adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru yang dilaksanakan oleh Sekolah Indonesia Bangkok memiliki dampak positif. Menurut kepala Sekolah SIB Bapak Olih Sodikul Hikmah dan guru yaitu Bapak Asep Saepudin Muhajir dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi ilmu dan juga bekal untuk guru yang pernah menjadi pendidik di SILN, dalam menjalankan tugas guru secara tanggung jawab dan professional.
- 2) Dapat menjadi bahan evaluasi sendiri bagi guru, apakah selama ini telah menjadi guru dengan baik dan sesuai dengan aturan juga cita-cita Bangsa.
- 3) Menjadi pengalaman agar di berkan kepada guru-guru yang lain di luar SILN untuk menjadi guru yang disiplin, tanggung jawab dan semestinya.

- 4) Bagi siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang baik dan maksimal meskipun dengan latar belakang siswa yang sedikit namun luar biasa. Luar biasa disini maksudnya yaitu tidak kalah dengan siswa yang banyak, mampu dan berani berjuang dan melawan tantangan pendidikan, ilmu dan pengalaman yang baik juga mendapatkan mutu pendidikan yang maksimal sebagai bekal melanjutkan studinya.
 - 5) Bagi staff Kedutaan Besar Republik Indonesia, staff KBRI berlatar belakang dari sebuah tugas pekerjaan yang harus berpindah-pindah Negara dari Negara yang satu menuju Negara lain. Hal tersebut memudahkan bagi mereka untuk meletakkan dan mempercayakan pendidikan bagi anaknya.
- b. Tingkat keberhasilan kebijakan pengembangan kompetensi professional guru
- Tingkat berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan akan dapat kita lihat dari pelaksanaan yang ada, seluruh guru yang memasuki SIB dan wilayah KBRI melakukan dengan baik, tanggung jawab dan tidak ada yang menolak. Dengan demikian kebijaka dapat dikatakan berhasil dan berjalan sesuai harapan.
- c. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan pengembangan kompetensi professional
- Dalam perjalanan pembuatan kebijakan tidak terdapat kendala yang serius, hal tersebut dilihat dari seluruh pihak mengikuti dan menjalankan

kebijakan yang ada dengan ikhlas dan disiplin serta tanggung jawab, hal ini dikemukakan oleh Bapak Kepala Sekolah (wawancara 20 Agustus 2019).

Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan, diantaranya;

- 1) Minimya tenaga pendidikan yang ada sehingga pengembangan kompetensi juga kurang maksimal termasuk hanya ada 1 Sekolah Indonesia yang ada di Bangkok, hal tersebut terdapat kesusahan dalam pelaksanaan perkumpulan dengan SILN yang lain. Selebihnya semua berjalan dengan baik tanpa terdapat kendala yang serius yang dihadapi.

4. Kebijakan pengembangan kompetensi professional

Beberapa kebijakan pengembangan kompetensi profesioanl guru di Sekolah Indonesia Bangkok sebagai berikut :

- a) Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus menjadi guru yang mampu mengajar berbagai jenjang (multi grades).
- b) Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus mampu mengajar berbagai mata pelajaran (multi subjects).
- c) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan terus menerus. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan workshop. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama perguruan tinggi di tanah air, SEAMEO, pakar,

instansi swasta, Kemendikbud dan guru SIB yang memiliki kapasitas pada bidang pelatihan.

- d) Guru Sekolah Indonesia Bangkok harus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas guru seperti (1) pelatihan implementasi kurikulum 2013; (2) penguatan pendidikan karakter; (3) workshop pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS; (4) workshop implementasi kurikulum 2013 berbasis STEM; (5) mind map based learning; (6) Smart School; (7) Sea creative camp; (8) pelatihan menulis satu guru satu buku (sagusabu); (9) workshop pembuatan soal berbasis komputer; (10) pertemuan dan perkumpulan dengan sekolah Luar Negeri; (11) Perkumpulan dan pelatihan dengan staff KBRI; (12) seluruh seminar yang berbasis international;

Selain kegiatan di atas, guru dan tenaga kependidikan harus mendapat dukungan untuk melakukan peningkatan kapasitas diri secara mandiri melalui kegiatan pelatihan secara daring dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan seminar atau konferensi yang diselenggarakan di Bangkok atau Thailand dan ASEAN.

5. Analisis Guru Profesional di Sekolah Indonesia Bangkok

Profesional merupakan sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan kemahiran dan juga keterampilan yang ia miliki dengan keahlian-keahlian dan juga kecakapan dengan standar mutu dan norma tertentu. Menurut para ahli professional harus berdasarkan penguasaan dan ilmu pengetahuan serta kemampuan

managemen dan juga strategi dalam menerapkan. Sehingga berkenaan dengan pendidik maka sebuah professional yakni menguasai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi demi mewujudkan mutu dan hasil yang maksimal (Hamid, 2017, pp. 176-177).

Terdapat beberapa indikator Guru Profesional di Sekolah Indonesia Bangkok, diantaranya:

- a. Seorang guru harus mampu menguasai bahan pembelajaran
- b. Seorang guru harus mampu mengelola media dan sumber
- c. Seorang guru harus mampu Mengelola PBM
- d. Seorang guru harus mampu mengelola kelas
- e. Seorang guru harus mampu menguasai landasan pendidikan
- f. Seorang guru harus mampu mengenal interaksi belajar mengajar
- g. Seorang guru harus mampu menilai prestasi siswa
- h. Seorang guru harus mampu mengenal fungsi dan program pelayanan BP
- i. Seorang guru harus mampu mengenal administrasi sekolah
- j. Seorang guru harus mampu dan memiliki keterampilan dan kemahiran dalam pembelajaran.
- k. Seorang guru harus mampu dalam kemampuan profesi
- l. Seorang guru harus mampu dalam kemampuan pribadi
- m. Seorang guru harus mampu dalam kemampuan social
- n. Seorang guru harus mampu mengikuti informasi perkembangan IPTEK

- o. Seorang guru harus mampu mengembangkan berbagai model pembelajaran
- p. Seorang guru harus mampu memiliki keterampilan mengajar
- q. Seorang guru harus mampu memiliki wawasan yang luas
- r. Seorang guru harus mampu menguasai 4 kompetensi guru
- s. Seorang guru harus mampu Menguasai kurikulum
- t. Seorang guru harus mampu mengikuti dan melaksanakan pengembangan kompetensi yang ada di SIB dan Thailand (hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019)

6. Regulasi / aturan Sekolah Indonesia Bangkok

Terdapat aturan atau regulasi berkenaan dengan Sekolah Indonesia Luar Negeri yaitu Sekolah Indonesia Bangkok (SIB) yang dirumuskan di peraturan bersama dibawah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertuang pada peraturan bersama Pendidikan Indonesia Luar Negeri, penyelenggaraan, pengelola dan pencabut. Adapun aturan yang tertuang pada Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Indonesia di Luar Negeri, terkait aturan-aturan menjadi guru di Sekolah Indonesia Bangkok (selengkapnya lihat pada lampiran).

Adapun regulasi untuk siswa yang sekolah di Sekolah Indonesia Bangkok yakni diutamakan putra-putri Warga Negara Indonesia akan tetapi diperbolehkan putra putri Warga Negara Asal dengan memenuhi syarat yang diberlakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan Indonesia Negara setempat. Aturan tersebut tertuang pada aturan bersama bagian kedua pasal 7 yang berbunyi :

Peserta didik SILN diutamakan bagi WNI yang tinggal di Luar Negeri, SILN menerima peserta didik WNA yang memenuhi persyaratan, persyaratan yang dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh SILN berdasarkan persetujuan dari kepala perwakilan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia Negara setempat dan hukum serta kebiasaan Internasional (selengkapnya lihat pada lampiiran).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwasannya penelitian ini merupakan penelitian kebijakan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, dan dengan pendekatan kualitatif dimana proses dalam menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari beberapa pihak yang melakukan dan diamati.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian dengan metode kebijakan, dimana penelitian bertujuan untuk memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan tersebut. Dan juga mampu mengetahui pelaksanaan kebijakan, penilaian kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Adapun jenis kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kebijakan substantive. Yakni dengan menggunakan analisis berupa integrative yang dimulai dari pembuatan kebijakan, diterapkannya kebijakan, dan juga dampak yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Hasilnya sebagai berikut:

1. Latar Belakang Perumusan Kebijakan

Terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru, beberapa landasan tersebut diantaranya:

a. Landasan historis

Maksudnya yakni sejarah diadakan dan didirikan sebuah lembaga Sekolah Indonesia Luar Negeri yakni melayani masyarakat yang ada di Luar Indonesia dengan mengikuti dan melihat tujuan dan cita-cita Bangsa juga Pendidikan Nasional.

b. Landasan geografis

Adanya sebuah kebijakan ini dikarenakan sebagai bentuk akan tanggung jawab yang tinggi dan serius akan tugas sebagai delegasi guru SILN demi menciptakan mutu dan mewujudkan tujuan Bangsa.

d. Landasan yuridis

Kebijakan pengembangan kompetensi professional guru ini memiliki landasan hukum dimana dapat kita ketahui pada kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang menjadi landasan kebijakan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

2. Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa jenis implementasi kebijakan;

- a. Implementasi yang berfokus pada dilaksanakannya atau tidak suatu kebijakan yang telah dibuat.

- b. Implementasi yang memiliki tujuan menghasilkan informasi terhadap hasil dari suatu kebijakan yang telah dilakukan.

Dari hasil tersebut jelas bahwasannya kebijakan yang ada di SIB berkenaan dengan pengembangan kompetensi professional guru telah dilakukan dengan baik, hal tersebut karena kebijakan dipatuhi oleh segenap individu atau pihak yang harus melakukan dan terlaksananya sebagaimana mestinya.

3. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan

Penilaian dan juga evaluasi sebuah kebijakan adalah sebuah aktivitas untuk melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dampak apa saja yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

- a. Dampak dari adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru

Adanya kebijakan pengembangan kompetensi professional guru yang dilaksanakan oleh Sekolah Indonesia Bangkok memiliki dampak positif.

- 1) Menjadi ilmu dan juga bekal untuk guru yang pernah menjadi pendidik di SILN, dalam menjalankan tugas guru secara tanggung jawab dan professional.
- 2) Dapat menjadi bahan evaluasi sendiri bagi guru, apakah selama ini telah menjadi guru dengan baik dan sesuai dengan aturan juga cita-cita Bangsa.

- 3) Menjadi pengalaman agar di berikan kepada guru-guru yang lain di luar SILN untuk menjadi guru yang disiplin, tanggung jawab dan semestinya.
- 4) Bagi siswa dan siswi mendapatkan pendidikan yang baik dan maksimal meskipun dengan latar belakang siswa yang sedikit namun luar biasa. Luar biasa disini maksudnya yaitu tidak kalah dengan siswa yang banyak, mampu dan berani berjuang dan melawan tantangan pendidikan, ilmu dan pengalaman yang baik juga mendapatkan mutu pendidikan yang maksimal sebagai bekal melanjutkan studinya.
- 5) Bagi staff Kedutaan Besar Republik Indonesia, staff KBRI berlatar belakang dari sebuah tugas pekerjaan yang harus berpindah-pindah Negara dari Negara yang satu menuju Negara lain. Hal tersebut memudahkan bagi mereka untuk meletakkan dan mempercayakan pendidikan bagi anaknya.

4. Tingkat keberhasilan kebijakan

Tingkat berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan akan dapat kita lihat dari pelaksanaan yang ada, seluruh guru yang memasuki SIB dan wilayah KBRI melakukan dengan baik, tanggung jawab dan tidak ada yang menolak. Dengan demikian kebijaka dapat dikatakan berhasil dan berjalan sesuai harapan.

5. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan

Dalam perjalanan pembuatan kebijakan tidak terdapat kendala yang serius, hal tersebut dilihat dari seluruh pihak mengikuti dan menjalankan kebijakan yang ada dengan ikhlas dan disiplin serta tanggung jawab.

Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan, diantaranya;

- a. Minimnya tenaga pendidikan yang ada sehingga pengembangan kompetensi juga kurang maksimal termasuk hanya ada 1 Sekolah Indonesia yang ada di Bangkok, hal tersebut terdapat kesusahan dalam pelaksanaan perkumpulan dengan SILN yang lain. Selebihnya semua berjalan dengan baik tanpa terdapat kendala yang serius yang dihadapi.

6. Kebijakan pengembangan kompetensi professional guru di Sekolah Indonesia Bangkok

Beberapa kebijakan pengembangan kompetensi profesioanl guru di Sekolah Indonesia Bangkok sebagai berikut :

- a. Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus menjadi guru yang mampu mengajar berbagai jenjang (multi grades).
- b. Seluruh guru yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok harus mampu mengajar berbagai mata pelajaran (multi subjects).
- c. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan terus menerus. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan workshop. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama perguruan tinggi di tanah air,

SEAMEO, pakar, instansi swasta, Kemendikbud dan guru SIB yang memiliki kapasitas pada bidang pelatihan.

- d. Guru Sekolah Indonesia Bangkok harus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti beberapa kegiatan peningkatan kapasitas guru seperti (1) pelatihan implementasi kurikulum 2013; (2) penguatan pendidikan karakter; (3) workshop pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS; (4) workshop implementasi kurikulum 2013 berbasis STEM; (5) mind map based learning; (6) Smart School; (7) Sea creative camp; (8) pelatihan menulis satu guru satu buku (sagusabu); (9) workshop pembuatan soal berbasis komputer; (10) pertemuan dan perkumpulan dengan sekolah Luar Negeri; (11) Perkumpulan dan pelatihan dengan staff KBRI; (12) seluruh seminar yang berbasis international.

Selain kegiatan di atas, guru dan tenaga kependidikan harus mendapat dukungan untuk melakukan peningkatan kapasitas diri secara mandiri melalui kegiatan pelatihan secara daring dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan seminar atau konferensi yang diselenggarakan di Bangkok atau Thailand dan ASEAN.

7. Guru professional di Sekolah Indonesia Bangkok

Seorang guru akan dikatakan professional di Sekolah Indonesia Bangkok apabila telah melakukan serentetan indicator dan aturan yang telah di tetapkan oleh lembaga dan Negara yag ada.

Sehingga dapat disimpulkan kebijakan pengembangan kompetensi professional guru bertujuan untuk memberikan dan menegaskan keseriusan guru dalam mengajar sebagai salah satu tujuan dan cita-cita Bangsa dan menciptakan guru yang berprofesional sehingga menjadikan mutu pendidikan yang berkualitas. Maka, dari evaluasi dan hasil disebutkan dengan jelas bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dikarenakan antara tujuan dari sebuah kebijakan dengan proses pelaksanaan kebijakan telah sesuai.